**THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY ARMED CRIMINAL GROUPS (KKB) IN PAPUA**

PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH KKB (KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA) DI PAPUA

**Herliyant Marsal Anugrah**

| ***Abstract*** |
| --- |

*The era of globalization brings numerous challenges to human rights violations worldwide, including in Indonesia. The human rights issue in Papua, known for its rich natural resources and cultural diversity, has become a controversial topic. Papua faces various problems, including friction between indigenous communities and non-Papuan immigrants, disinformation campaigns, and reports of human rights violations by the Indonesian security forces. Factors adding to the complexity of the situation in Papua include its colonial background, local power dynamics, and advancements in communication technology. The principle of legality plays a crucial role in this context, ensuring every government action is based on existing laws. This qualitative research explores the application of the legality principle concerning human rights violations by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua, focusing on the protection of human rights for Papuans. The research results show that the legality principle emphasizes the importance of government actions being based on existing laws and the need for consistent application of laws that do not conflict with human rights. The conflict in Papua requires a holistic solution approach, considering political, social, and cultural elements and strengthening education about human rights and the development of social infrastructure.*

***Keywords****: Human Rights, Papua, Principle of Legality, Armed Criminal Group (KKB).*

| **Abstrak** |
| --- |

Era globalisasi membawa sejumlah tantangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Isu HAM di Papua, yang dikenal kaya dengan sumber daya alam dan keberagaman budaya, menjadi topik yang kontroversial. Papua menghadapi berbagai masalah, termasuk gesekan antara masyarakat asli dengan pendatang non-Papua, kampanye disinformasi, serta laporan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia. Faktor-faktor yang menambah kompleksitas situasi di Papua meliputi latar belakang kolonial, dinamika kekuasaan lokal, dan perkembangan teknologi komunikasi. Prinsip legalitas berperan penting dalam konteks ini, memastikan setiap tindakan pemerintah berlandaskan hukum yang ada. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi penerapan asas legalitas dalam konteks pelanggaran HAM oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia bagi warga Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas menekankan pentingnya tindakan pemerintah berdasar pada hukum yang ada dan perlunya konsistensi penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan HAM. Konflik di Papua memerlukan pendekatan solusi yang holistik, mempertimbangkan elemen politik, sosial, dan budaya serta penguatan edukasi mengenai hak asasi dan pembangunan infrastruktur sosial.

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia (HAM), Papua, Prinsip Legalitas, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

1. **PENDAHULUAN**

Di tengah era modern dan pertumbuhan kesadaran terhadap hak asasi manusia, isu pelanggaran terhadap hak tersebut telah mendapat sorotan intens di seluruh dunia. Globalisasi, yang mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan budaya, menyajikan berbagai tantangan, termasuk di Indonesia yang berpotensi menghadapi berbagai pelanggaran hak (Erlina, 2011). Beberapa hambatan yang muncul dalam era globalisasi mencakup pelanggaran hak asasi di berbagai negara, mulai dari pembantaian massal, pembersihan etnik, hingga aksi teror. Tidak hanya itu, kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada saat ini sering menghalangi banyak individu dari hak dasarnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman serius terhadap hak seseorang untuk hidup di lingkungan yang sehat. Institusi yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia kini semakin penting di era globalisasi. Menurut Selyawati dan Dewi (2017), Sejarah hak asasi manusia, baik di dunia maupun di Indonesia, menggambarkan bagaimana kesadaran akan hak tersebut meningkat saat terjadi pelanggaran besar-besaran, seperti perbudakan atau penjajahan. Banyak bangsa telah mengekspresikan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia melalui berbagai konvensi, konstitusi, dan undang-undang, menunjukkan betapa pentingnya isu ini di kancah global.

Menurut Widayati (2016), Asas legalitas merupakan landasan pokok dalam hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1 KUHP yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat diadili berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama asas legalitas adalah untuk menjaga hak asasi setiap individu, memastikan pemerintah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, serta menanamkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi sistem hukum. Selain itu, asas legalitas sering dikaitkan dengan asal-muasal hukum, terutama dalam hukum pidana, di mana sumber utamanya adalah Undang-Undang. Asas legalitas telah dikenal sejak lama sebagai landasan dalam sejarah peradaban hukum dan diakui sebagai alat penting untuk "menstandarisasi pengawasan" dalam hukum pidana. Akan tetapi, asas ini juga membawa beberapa konsekuensi dan tantangan, seperti tugas bagi pembuat undang-undang dan peraturan daerah untuk menetapkan kebijakan dengan jelas, demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Papua, yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan memiliki beragam budaya, telah menjadi topik perdebatan sejak dimasukkannya ke dalam wilayah NKRI. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa ada pertentangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua. Selain permasalahan dengan kelompok pro-kemerdekaan, ada pula gesekan antar suku serta antara masyarakat asli Papua dengan pendatang non-Papua. Terlebih, ada upaya disinformasi yang mendukung pemerintah dengan menyebarkan konten yang mendukung pandangan pemerintah Indonesia mengenai situasi di Papua melalui Twitter dalam bahasa Indonesia. Menariknya, banyak masyarakat Papua yang menggunakan Bahasa Melayu, basis dari Bahasa Indonesia (Gietzelt, 1989). Namun, beberapa laporan menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap penduduk Papua. Faktor-faktor yang membuat situasi di Papua menjadi kompleks antara lain latar belakang kolonial, dinamika kekuasaan di tingkat lokal, serta perubahan dalam bidang komunikasi.

Isu-isu di Papua melibatkan aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. Dari hasil penelusuran, beberapa poin penting mengenai konflik di Papua mencakup masalah pembangunan seperti kekurangan dalam pengembangan infrastruktur sosial, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Ada perbedaan pendapat antara pemerintah Indonesia dan kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua. Selain itu, terdapat gesekan antar suku dan antara masyarakat asli Papua dengan pendatang non-Papua. Kampanye disinformasi yang mendukung pemerintah pun telah menyebar melalui Twitter dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, banyak warga Papua yang menggunakan Bahasa Melayu, yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia. Beberapa laporan juga mencatat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap penduduk Papua. Faktor lain yang menambah kompleksitas situasi di Papua adalah sejarah kolonial, dinamika kekuasaan lokal, dan perkembangan teknologi komunikasi (Sugandi, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan di Papua sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan solusi yang holistik. Pendekatan ini seharusnya mempertimbangkan elemen-elemen politik, sosial, dan budaya, serta memfokuskan pada penguatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hak, revitalisasi bahasa daerah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tradisional dan nasional.

Prinsip legalitas berfungsi sebagai landasan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh KKB di Papua. Dari hasil analisis, dapat dipahami bahwa prinsip legalitas menggarisbawahi pentingnya setiap tindakan pemerintah berlandaskan hukum yang ada. Ini menegaskan bahwa pemerintah harus beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak boleh melakukan pelanggaran hak asasi manusia saat menyelesaikan konflik di Papua. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia oleh KKB di Papua, negara Indonesia berada dalam posisi untuk melindungi hak asasi warganya dan memastikan keadilan hukum. Ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Edon dan Hidayat, 2021).

Meski demikian, ada laporan yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh keamanan nasional terhadap penduduk Papua. Oleh karena itu, penting untuk merevisi kebijakan operasi militer di Papua dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia bagi warga Papua. Dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua, pemerintah harus mempertimbangkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Peningkatan edukasi mengenai hak asasi, penguatan tradisi budaya lokal termasuk pemeliharaan bahasa daerah, serta pemberdayaan generasi muda melalui pendidikan tradisional dan formal menjadi esensial. Tambahan lagi, isu-isu pembangunan seperti kekurangan fasilitas sosial, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat juga harus menjadi prioritas (Putri *et al.* 2022).

1. **METODE**

Studi ini memakai pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana asas legalitas diberlakukan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua. Dengan menggunakan metode kualitatif, kita dapat menggali lebih dalam informasi yang diperoleh baik melalui komunikasi langsung maupun dokumentasi tertulis. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih kaya tentang inti permasalahan. Salah satu kelebihan pendekatan ini adalah kapasitasnya untuk meninjau suatu kasus dari beragam sisi, termasuk dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, politik, dan kultural Papua, sehingga mendapatkan pandangan yang lebih holistik (Robbani dan El Adawiyah, 2023). Studi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan asas legalitas mempengaruhi aksi KKB dan implikasinya terhadap hak asasi warga Papua. Sebagai pendukung analisis, penelitian ini mengacu pada sumber-sumber seperti peraturan hukum yang ada, literatur akademik yang relevan, dokumentasi mengenai hak asasi manusia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Proses analisis mengadopsi pendekatan deduktif, di mana interpretasi ditarik dari informasi yang telah dikumpulkan, memberikan pandangan mendalam tentang masalah yang sedang dihadapi.

1. **HASIL**

Prinsip asas legalitas menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 KUHP yang menyebutkan hanya tindakan yang telah diatur dalam undang-undang yang bisa dikenai hukuman pidana. Tujuan utama dari asas legalitas dalam sistem hukum adalah untuk menjaga hak dasar individu, menjamin keadilan, memberi kepastian hukum, membatasi kewenangan pemerintah, dan memperkuat kepercayaan publik. Asas ini juga menetapkan batas bagi kekuasaan negara, memastikan bahwa negara tidak dengan semena-mena mengkategorikan tindakan warganya sebagai tindakan pidana. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang dan dikenai sanksi kecuali sudah diatur dalam undang-undang. Asas legalitas memberikan nuansa protektif terhadap undang-undang pidana, melindungi masyarakat dari penerapan kekuasaan pemerintah yang tidak terkontrol. Asas ini juga terkait dengan fungsi undang-undang pidana sebagai alat yang, dalam batasan yang diatur oleh undang-undang, memperbolehkan pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya. Selain itu, asas legalitas harus selalu diterapkan dengan konsistensi dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar manusia.

Konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan pemerintah di Papua bermula sejak 1969, menjadikannya salah satu pertikaian terpanjang dalam era modern. Masalah pembangunan yang belum optimal, termasuk kekurangan dalam infrastruktur sosial, pendidikan, dan perekonomian rakyat, menjadi salah satu pemicu ketegangan. Selain itu, ada gesekan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua, serta adanya ketidakharmonisan antara penduduk asli dengan pendatang non-Papua. Pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan kepada aparat keamanan Indonesia menambah daftar persoalan yang dihadapi Papua. Sementara itu, Gerakan Papua Merdeka semakin menunjukkan organisasi yang lebih matang, menggali dukungan melalui jalur budaya, sosial, diplomasi internasional, penguasaan senjata, dan bahkan mendapat perhatian dari aktivis NGO internasional.

Pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah terdokumentasi dalam berbagai sumber yang kredibel. KKB tercatat melakukan serangkaian tindak kekerasan, mulai dari serangan terhadap masyarakat sipil, pembunuhan, hingga pengeboman. Tindakan mereka telah menyebabkan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur, menimbulkan rasa ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat Papua. Aparat keamanan pun kerap menjadi sasaran serangan mereka. Meski pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan konflik dan melindungi hak asasi manusia di Papua, masih banyak rintangan yang dihadapi dalam mewujudkan perdamaian. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KKB termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan massal, pemusnahan, perbudakan, hingga pemindahan penduduk secara paksa

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan hak asasi manusia di Papua, sejalan dengan prinsip legalitas, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa tindakan yang diambil meliputi penerapan operasi militer yang memperhatikan hak asasi manusia, penegasan sikap yang jelas dan tegas dalam penanganan KKB, serta upaya untuk meminimalisir ancaman bagi warga Papua. Selain itu, ada penekanan pada pentingnya perhatian terhadap aspek pembangunan, seperti infrastruktur sosial, pendidikan, dan perekonomian rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak asasi warga. Meski ada kebijakan operasi militer yang disesuaikan dengan ketentuan hukum tersebut, laporan mengenai pelanggaran hak asasi oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas dalam konteks konflik Papua dengan KKB masih menemui rintangan.

Dalam menerapkan asas legalitas di lapangan, berbagai kendala dihadapi, seperti kesulitan akses ke wilayah konflik, tantangan dalam mengumpulkan bukti, serta adanya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat Papua dalam menyelesaikan konflik. Ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap aparat keamanan Indonesia dan laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat terhadap warga Papua memperkomplekskan situasi. Di samping itu, keberadaan hukum adat atau living law yang masih dipraktikkan di beberapa komunitas dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum nasional menambah tantangan, berpotensi memicu konflik.

Beberapa organisasi internasional seperti *Amnesty International dan Human Rights Watch* telah memberi perhatian pada konflik di Papua dan telah mengeluarkan laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan Indonesia serta KKB. Masyarakat internasional menyoroti pentingnya penerapan asas legalitas dalam penyelesaian konflik di Papua serta penegakan hak asasi manusia, dengan menekankan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan isu-isu krusial yang menjadi hambatan dalam penerapan asas legalitas dan mengambil langkah-langkah tepat serta berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam upaya meningkatkan penerapan asas legalitas dalam penanganan kasus pelanggaran HAM oleh KKB di Papua, penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan berbagai isu krusial. Ini mencakup kendala-kendala seperti akses terbatas ke lokasi konflik dan kesulitan dalam pengumpulan bukti. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen dengan langkah-langkah tepat dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik serta menegakkan hak asasi manusia di Papua. Penting juga untuk menghormati dan memahami hukum adat atau *living law* yang berlaku di komunitas tertentu dan mempertimbangkan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional yang bisa berpotensi menimbulkan konflik. Mengakui laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, memahami perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat Papua, serta mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat adalah langkah-langkah kritis lainnya yang perlu diperhatikan.

1. **PEMBAHASAN**
2. Interpretasi Asas Legalitas

Menurut Nasional *et al.* 2015, Dalam hukum Indonesia, asas legalitas diartikan sebagai prinsip yang menyatakan tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Mengacu pada kasus pelanggaran HAM oleh KKB di Papua, prinsip ini menekankan pentingnya menegakkan hukum pidana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah mengenai berbagai isu, seperti tantangan akses ke wilayah konflik dan hambatan dalam pengumpulan bukti. Selanjutnya, solusi komprehensif dan berkesinambungan diperlukan untuk menyelesaikan konflik di Papua dan menegakkan hak asasi manusia. Pemerintah juga harus mempertimbangkan hukum adat atau *living law* yang efektif di beberapa komunitas, serta perbedaan fundamental antara hukum adat dan hukum nasional. Isu-isu lain seperti laporan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat Papua, serta masalah kepercayaan terhadap aparat keamanan juga harus ditangani. Melalui pemahaman dan penerapan saran ini, diharapkan penerapan asas legalitas dalam mengatasi pelanggaran HAM oleh KKB di Papua dapat lebih efektif.

1. Analisis Konteks Sejarah Konflik

Sejarah permasalahan di Papua telah memberikan dampak terhadap penerapan prinsip legalitas di saat ini. Sumber konflik di Papua sebagian besar berasal dari pandangan yang berbeda mengenai bagaimana Papua menjadi bagian dari Indonesia, dan ini telah menjadi isu kontroversial sejak awal integrasinya (Sugandi, 2008). Disamping itu, perbedaan kondisi sosial antara warga Papua dengan penduduk Indonesia di daerah lain juga turut memperparah konflik. Hal ini mencakup kekurangan dalam pembangunan sosial di Papua, tindakan pelanggaran hak asasi oleh pihak berwenang di daerah tersebut, serta ketidakberhasilan dalam membangun ekonomi dan infrastruktur di Papua. Terlebih, ada pula gerakan yang mendukung pemisahan Papua dari Indonesia yang memicu ketegangan.

Dari sisi asas legalitas, permasalahan di Papua memperlihatkan bahwa implementasi hukum dan kebijakan di wilayah tersebut belum mampu menangani permasalahan dengan efektif. Ini menyoroti kebutuhan untuk memasukkan pendekatan berbasis budaya dan sosial dalam menangani isu-isu di Papua, untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar di masa mendatang.

1. Dinamika Pelanggaran HAM oleh KKB

Menurut Putri *et al.* (2022), pelanggaran hak asasi manusia oleh KKB di Papua dipicu oleh berbagai alasan, termasuk pandangan berbeda tentang bagaimana Papua bergabung dengan Indonesia, ketimpangan sosial antara warga Papua dan penduduk di daerah lainnya di Indonesia, serta dorongan dari gerakan yang menginginkan Papua untuk berpisah dari Indonesia. Akibat dari faktor-faktor tersebut, KKB melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM seperti pembantaian, serangan, dan kekerasan terhadap penduduk sipil serta pasukan keamanan.

Aksi dari KKB telah meningkatkan ketidakamanan dan ketegangan di kalangan masyarakat Papua. Reaksi pemerintah terhadap tindakan KKB juga berdampak pada masyarakat Papua, khususnya dalam cara hukum dan kebijakan diterapkan di wilayah itu. Walaupun pemerintah mengambil pendekatan berbasis keamanan untuk menangani masalah di Papua, cara ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam meredakan konflik dan memenuhi harapan masyarakat Papua. Tanggapan pemerintah ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat Papua melihat posisi mereka dalam kerangka negara dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Untuk menghadapi pelanggaran HAM oleh KKB, pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan budaya lokal diperlukan dalam menangani permasalahan di Papua. Pemerintah harus lebih memperdalam pemahaman akan kebutuhan masyarakat Papua dan menciptakan hubungan yang baik melalui komunikasi dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan di Papua (Sugandi, 2008). Peningkatan dalam penegakan hukum dan kebijakan di Papua juga esensial untuk mencegah aksi pelanggaran HAM oleh KKB.

1. Penerapan Asas Legalitas dalam Perspektif Internasional
2. Norma Internasional Terkait Asas Legalitas dan Implementasinya di Indonesia

Dalam hukum internasional, asas legalitas adalah prinsip pokok yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berdasar pada peraturan hukum yang eksplisit dan dapat dikenali dengan jelas (Adhari *et al.*  2021). Prinsip ini juga mengharuskan penerapan hukum yang konsisten dan adil, serta menegaskan bahwa setiap individu dianggap tak bersalah hingga bukti menunjukkan sebaliknya (Smith *et al.* 2008).

Indonesia, dalam konstitusinya yakni UUD 1945, serta melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah mengadopsi dan menerapkan prinsip legalitas ini. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, implementasi asas legalitas di Indonesia terkadang terhambat oleh isu-isu seperti ambiguitas dalam hukum, tindak korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia (Adhari *et al.*  2021).

1. Reaksi Internasional Atas Pelanggaran HAM di Papua dan Implementasi Asas Legalitas di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian global terhadap isu pelanggaran HAM di Papua meningkat. Amnesty International Indonesia telah memonitor dan melaporkan berbagai insiden pelanggaran HAM di Papua, termasuk tindakan eksekusi tanpa pengadilan oleh pihak berwenang maupun kelompok separatis. Lembaga global lain seperti PBB, telah mengungkapkan keprihatinan mereka atas situasi di Papua dan mendesak Indonesia untuk menghargai dan melindungi hak asasi warganya di sana.

Namun, pandangan dunia internasional mengenai implementasi prinsip legalitas di Indonesia bukan semata-mata kritis. Indonesia telah mengakui dan mengadopsi berbagai instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional, termasuk delapan kovenan dan dua protokol tambahan. Selain itu, ada beberapa lembaga negara independen di Indonesia, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman, yang memiliki mandat untuk mengawasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini.

Akan tetapi, isu pelanggaran asas legalitas, khususnya di Papua, tetap menjadi sorotan internasional. Situasi HAM di Papua serta tanggapan pemerintah Indonesia atasnya telah menarik perhatian dunia, menunjukkan bahwa implementasi prinsip legalitas di Papua masih perlu ditingkatkan untuk merespon konflik dan kebutuhan penduduk setempat dengan lebih efektif. Maka dari itu, pendekatan yang lebih berorientasi kemanusiaan serta mempertimbangkan aspek sosial budaya dianggap esensial dalam mencari solusi untuk Papua (Adhari *et al.*  2021).

1. Tantangan Penerapan Asas Legalitas

Berbagai rintangan dalam pelaksanaan prinsip legalitas di Papua meliputi isu-isu geografis, politik, sosial, dan budaya. Berikut adalah beberapa kendala dalam mewujudkan prinsip legalitas di Papua:

1. Isu Geografis

Papua, dengan luas wilayahnya dan keragaman suku serta bahasa, menciptakan tantangan dalam menerapkan regulasi dan kebijakan secara konsisten di seluruh daerah.

1. Isu Politik

Perselisihan politik antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok separatis di Papua telah berlarut-larut selama tahun-tahun. Situasi ini menciptakan ketidakpastian politik dan keamanan, yang berdampak pada pelaksanaan prinsip legalitas.

1. Isu Sosial

Perbedaan sosial antara penduduk Papua dengan penduduk di wilayah Indonesia lainnya menjadi penghalang dalam menerapkan prinsip legalitas. Masalah sosial seperti kemiskinan, akses terbatas ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pelanggaran hak asasi manusia, mempengaruhi pelaksanaan regulasi di daerah tersebut.

1. Isu Budaya

Dengan keragaman budaya yang dimiliki, Papua memiliki berbagai hukum adat dari masing-masing suku. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam menerapkan regulasi yang universal bagi seluruh penduduk Papua.

Untuk menangani rintangan-rintangan di atas, pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemahaman budaya lokal diperlukan dalam menangani isu-isu di Papua, sehingga dapat mencegah terjadinya bentrokan lebih lanjut. Sangat penting bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan penduduk Papua dan memupuk rasa saling percaya, melalui dialog dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Sugandi, 2008). Selain itu, efisiensi dalam penegakan hukum dan regulasi perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi pelanggaran HAM.

1. Komparasi dengan Kasus Serupa di Negara Lain

Beberapa negara telah mengalami situasi mirip dengan konflik di Papua, dimana implementasi prinsip legalitas menjadi salah satu isu utama dalam penyelesaian konflik. Berikut beberapa contoh situasi tersebut beserta pendekatan prinsip legalitas:

1. Konflik Aceh di Indonesia

Aceh menghadapi konflik berkepanjangan, dengan isu prinsip legalitas menjadi salah satu tantangannya. Namun, berkat dialog dan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, ketegangan tersebut akhirnya mereda.

1. Perselisihan Israel-Palestina

Persoalan Israel-Palestina termasuk dalam isu prinsip legalitas, khususnya berkaitan dengan pertikaian lahan dan hak asasi manusia. Meski ada beberapa upaya perjanjian damai, konflik ini tetap berlanjut sampai sekarang.

1. Ketegangan Rohingya di Myanmar

Konflik antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis Rohingya memperlihatkan tantangan prinsip legalitas. Tindakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya mendapat sorotan dunia, menunjukkan kesulitan dalam menerapkan prinsip legalitas untuk menyelesaikan konflik dan memenuhi hak-hak Rohingya.

Dari situasi-situasi di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendekatan kemanusiaan, kebudayaan, dialog, dan kesepakatan damai antar pihak terlibat sangat penting. Efektifitas prinsip legalitas juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum yang bekerja dengan integritas dan keadilan (Smith *et al.* 2008).

1. Rekomendasi dalam meningkatkan implementasi prinsip legalitas di Papua.

 Berdasarkan evaluasi dan pemahaman yang mendalam, berikut beberapa rekomendasi spesifik untuk meningkatkan implementasi prinsip legalitas di Papua:

1. Optimalisasi penegakan hukum di Papua untuk menghindari pelanggaran HAM oleh KKB.
2. Memperkuat keterlibatan masyarakat Papua dalam proses pembangunan daerah mereka serta menjalin hubungan kepercayaan melalui komunikasi aktif.
3. Menyuarakan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, serta memperdalam hubungan melalui dialog dan keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan.
4. Mengedepankan pendekatan berbasis kemanusiaan dan pemahaman kebudayaan saat menangani isu-isu di Papua untuk mencegah eskalasi konflik di masa mendatang.
5. Memperkuat peran lembaga-lembaga negara independen, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dari studi kasus di berbagai negara, kita memahami bahwa solusi konflik yang berhasil memerlukan pendekatan berbasis kemanusiaan, pemahaman kebudayaan, dialog konstruktif, dan perjanjian damai yang adil. Selain itu, keberhasilan penerapan prinsip legalitas sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada pemerintah dan institusi hukum yang bekerja dengan integritas (Eka, 2021).

1. Implikasi Temuan bagi Masa Depan Papua

Berdasarkan hasil analisis penelitian, ada beberapa konsekuensi yang mungkin muncul terkait masa depan Papua dan interaksi antara Papua dan Indonesia. Beberapa saran spesifik untuk meningkatkan penerapan prinsip legalitas di Papua meliputi:

1. Pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan daripada sekedar pendekatan keamanan dalam menangani isu-isu di Papua.
2. Penting bagi pemerintah untuk memahami dan menanggapi kebutuhan masyarakat Papua, serta membangun hubungan kepercayaan melalui dialog terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di Papua.
3. Upaya penegakan hukum di Papua harus dioptimalkan agar pelanggaran HAM, khususnya oleh KKB, dapat diminimalisir.
4. Peran lembaga-lembaga negara yang independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditingkatkan dalam pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerapan saran-saran tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik dan keamanan yang lebih baik di Papua, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua pada pemerintah pusat dan institusi hukum di Indonesia. Ini akan berkontribusi pada pemaduan yang lebih erat antara Papua dan keseluruhan wilayah Indonesia (Chandra dan Sitabuana, 2022).

1. **KESIMPULAN**

Dalam kerangka hukum Indonesia, asas legalitas memegang peranan penting, menekankan bahwa tiada tindakan yang dapat dipidana tanpa dasar undang-undang yang jelas. Hal ini relevan dengan kasus pelanggaran HAM di Papua, yang menuntut keadilan dan ketegasan sesuai regulasi yang ada. Akan tetapi, permasalahan di Papua mencerminkan kompleksitas historis, sosial, dan budaya yang mendalam. Isu-isu seperti integrasi Papua, ketidaksetaraan sosial, dan gerakan pemisahan telah menyebabkan pelanggaran HAM oleh KKB. Pada sisi lain, reaksi pemerintah dalam menanggapi aksi KKB belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat setempat. Ketika dilihat dalam konteks internasional, sementara ada kritik atas implementasi asas legalitas di Papua, juga terdapat pengakuan atas upaya Indonesia dalam mengadopsi norma-norma HAM. Namun, sorotan internasional mengenai pelanggaran HAM di Papua menegaskan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Tantangan dalam menerapkan asas legalitas di Papua melibatkan beragam faktor mulai dari geografis, politik, sosial, hingga budaya. Penerapan prinsip ini juga dilihat dalam komparasi dengan kasus serupa di negara lain, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat, dialog, dan pendekatan kemanusiaan merupakan kunci penting dalam upaya penyelesaian konflik. Oleh karena itu, rekomendasi untuk meningkatkan implementasi asas legalitas di Papua melibatkan optimalisasi penegakan hukum, keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan komunikasi dan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A., Sitabuana, T. H., & Srihandayani, L. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan Internet Restriction Policies in. *Jurnal Konstitusi*, *8*(2).

Chandra, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Kebijakan Negara Mmelakukan Pembatasan Internet di Papua dan Papua Barat dalam Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/PTUN-JKT melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, *3*(10), 1353-1360.

Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(3), 854-869.

Eka, R. I. (2021). Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, *2*(1), 63-72.

Erlina, B. (2011). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB) di Indonesia*. Bandar Lampung University*.*

Gietzelt, D. (1989). The Indonesianization of West Papua. *Oceania*, *59*(3), 201-221.

Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

Putri, S. N., Utomo, M. F. N., Erlangga, R. W., & Hikmah, N. (2022). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, *3*(2), 42-53.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Sugandi, Y. (2008). *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Selyawati, N. P., & Dewi, M. C. (2017). Implementation of Universal Human Rights Values Based on the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 41-56.

Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Widayati, L. S. (2016). Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *2*(2), 307-328.